

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA.

TULUNGAGUNG

AG 874452

12 · 27 · 12 · 11 · 1 · 00204

BADAN PERTANAHAN NASIONAL**BUKU TANAH**HAK : **milik** No. 285 (Walaf)

PROINSI : **JAWA TIMUR**
 KABUPATEN/KOTAMADYA : **TULUNGAGUNG**
 KECAMATAN : **BANTULU** GONDANG
 DESA/KELURAHAN : **CASOGO** GONDANG

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

DAFTAR ISIAN 208*

No. 159019 19.25

DAFTAR ISIAN 207

No. 159019 19.05

TULUNGAGUNG

12 · 27 · 12 · 11 · 1 · 00285

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK Milik No. 285 (Wakaf) Desa Gondang Gondang</p>	<p>0 NAMA PEMEGANG HAK Haji KUSMIN</p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL Perumahan</p>	
<p>c) ASAL PERSIL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konversi belas yasan 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan 	<p>d) PEMBUKUAN Tulungagung Tgl. 22 - 9 - 99 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tulungagung</p> <p><i>Ltr.</i></p> <p>R. IMAM SOBJONO BA NIP 010048775</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN</p> <p>Uang pemasukan/biaya administrasi</p> <p>Lamanya hak berlaku</p> <p>Berakhirnya hak</p> <p>Tgl. —</p>	<p>e) PENERBITAN SERTIPIKAT Tulungagung Tgl. 22 - 9 - 99 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tulungagung</p> <p><i>Mtmm</i></p> <p>R. IMAM SOBJONO BA NIP 010048775</p>
<p>e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 4-9-1995 No. 4179 / 229 M2 Luas 2.880 M2.</p>	<p>f) PENUNJUK D.218 / 3 d I Peng.tgl. 21-7-1995 No. 875 301 / I / 2286 / 4 III / 2645 / 1995</p>

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBERBANAN DAN PENCALAHAN LAINNYA

chinaman 2

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBERANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Istamas

Sebab peralihan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepada Kantor dan Cap Kantor
			

12.27.12.11.1.00285

DAFTAR ISIAN 207

Nomor hak : N. 285

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

4179 95

Nomor : /19.....

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Jawa Timur

Propinsi : Tulungagung

Kabupaten/Kotamadya : Bondowoso

Kecamatan : Gundang

Desa/Kelurahan : Desa

Peta : 1 B/2

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Sebidang tanah diatasnya berdiri dua buah rumah batu -

Keadaan Tanah : beratap genting.

Tembok a - b ; c - d berdiri diluar batas.

Tanda-tanda batas : Tugu I e/dv VI berdiri ditengah batas.

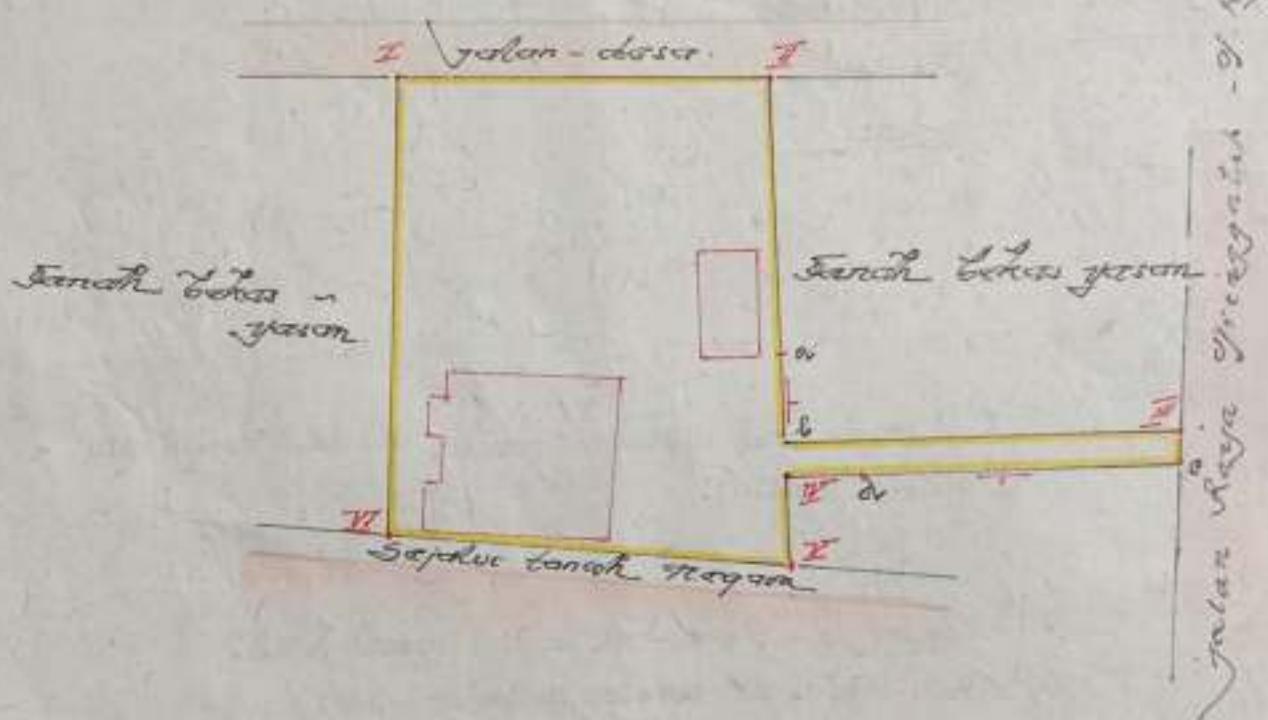
Tanda tanda batas memenuhi PMA No.8/1961 pasal 2 ayat e.

Luas : 720 m² (Tujuh ratus dua puluh meter persegi)
..... 2.880 M² (Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Meter Persegi).-

Batas batas ditunjukkan oleh :

Penunjukan dan penetapan batas : R.R. KANTI SABAN : E

PERBANDINGAN 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain

Daftar Isian 302 tgl No. 3230/25-

Daftar Isian 307 tgl. 19.9.1941 No. 12516

Tulungagung 4 - 9 95

Tgl. 19.

UNTUK SERTIPIKAT

Tulungagung Tgl. 19.4.1941

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

Tulungagung

ttd

R. IMAN SOEJONO BA

M A R S I T O

NIP 010048775

010039140

Lihat surat ukur dan gambar situasi Pemisahan Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur dan gambar situasi Nomor : /19..... Nomor hak

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut 1 Pejabat. Akta tersebut berturutnya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerimanya tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
 - a. Permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralesan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralesan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

